

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BENGKULU
2017**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya jualah penyusunan LAKIP Kantor Perwakilan 2016 ini dapat diselesaikan. Adapun penyusunan LAKIP ini adalah untuk memenuhi Surat Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : 005/0153/B.5/2018 Tanggal 9 Januari 2018 Perihal Pelaksanaan Sistem Akutantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang. Tidak terasa kita telah melaksanakan tugas-tugas yang didiamanatkan oleh Gebernur Bengkulu pada Tahun 2017 yang terdiri dari beberapa program maupun kegiatan untuk mencapai Visi Gubernur Bengkulu.

Adapun dokumen LAKIP ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bengkulu selama Tahun Anggaran 2017. Kiranya lampiran ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara pada umumnya dan Provinsi Bengkulu pada khususnya.

Dengan segala keterbatasan, kami menyadari pula bahwa pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017 takkan terwujud tanpa batuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian, semoga LAKIP ini dapat membawa manfaat

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Bengkulu



Drs Khairil Anwar M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19711031199101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2017 ini, Badan Penghubung Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2017 untuk mencapai 5 (lima) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 4 (empat) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran hingga 100%. Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
6. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
7. Program Promosi Pemerintah Daerah Bengkulu

Secara keseluruhan Badan Penghubung telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya setelah APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp. 11.110.532.805 (Sebelas Milyar Seratus Sepuluh Juta Lim Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.480.400.306,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.766.263.735,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Senam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja 2017 sudah dirasa mengarah kepada tingkat optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna terciptanya suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala representative

Jakarta, 30 Januari 2018
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Drs.Khairil Anwar.,M.Si
Pembina NIP. 19711031 199101 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Gambaran Organisasi	3
1. Kedudukan Badan Penghubung Prov Bengkulu	3
2. Tugas Badan Penghubung.....	3
3. Fungsi Badan Penghubung	3
4. Susunan Organisasi Badan Penghubung	3
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2017	
A. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021	15
B. Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2016-2021	16
2.2.1. Visi dan Misi	16
2.2.2. Tujuan dan Sasaran	18
2.2.3. Strategi dan Kebijakan	15
2.2.4. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD	16
2.2.5. Indikator Kinerja dari Setiap Sasaran	19
2.2.8. Penetapan Kinerja	23
C. AKUNTABILITAS KINERJA	23 ..
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	24
B. Saran	24

DAFTAR TABEL

- 1. Daftar Urut Kepangkatan per 31 Desember 2017**
- 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 januari s/d 31 Desember 2017**
- 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja & Pengeluaran periode 1 januari s/d 31 Desember 2017**
- 4. NERACA TA. 2017**
- 5. Laporan Mutasi Barang Semester I TA.2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil; maka Pemerintah melalui Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa Instansi Pemerintah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun format penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Penetapan Kinerja dapat dipergunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Badan Penghubung, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Badan Penghubung;
2. LAKIP dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Menyikapi hal tersebut di atas, Badan Penghubung Provinsi Bengkulu sebagai salah satu unit kerja yang mendukung terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mewujudkan atau menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dengan cara melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah dan Daerah;
3. UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1968 tentang berlakunya UU No. 9 tahun 1967 (tentang pembentukan Provinsi Bengkulu);
5. Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Pasal 64 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bengkulu;
8. Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Perda Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

C. Gambaran Organisasi

1. Kedudukan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah unsur penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas menunjang Gubernur dalam memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah provinsi.

3. Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis bidang penghubung;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup bidang penghubung;
- Penataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- Pelaksanaan administrasi badan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
-

4. Susunan Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki Susunan Organisasi, yaitu sebagai berikut:

- Kepala Badan;
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Sub Bidang Promosi dan Informasi;
- Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah;
- Kelompok Jabatan Fungsional;
- Unit Pelaksana Teknis Badan

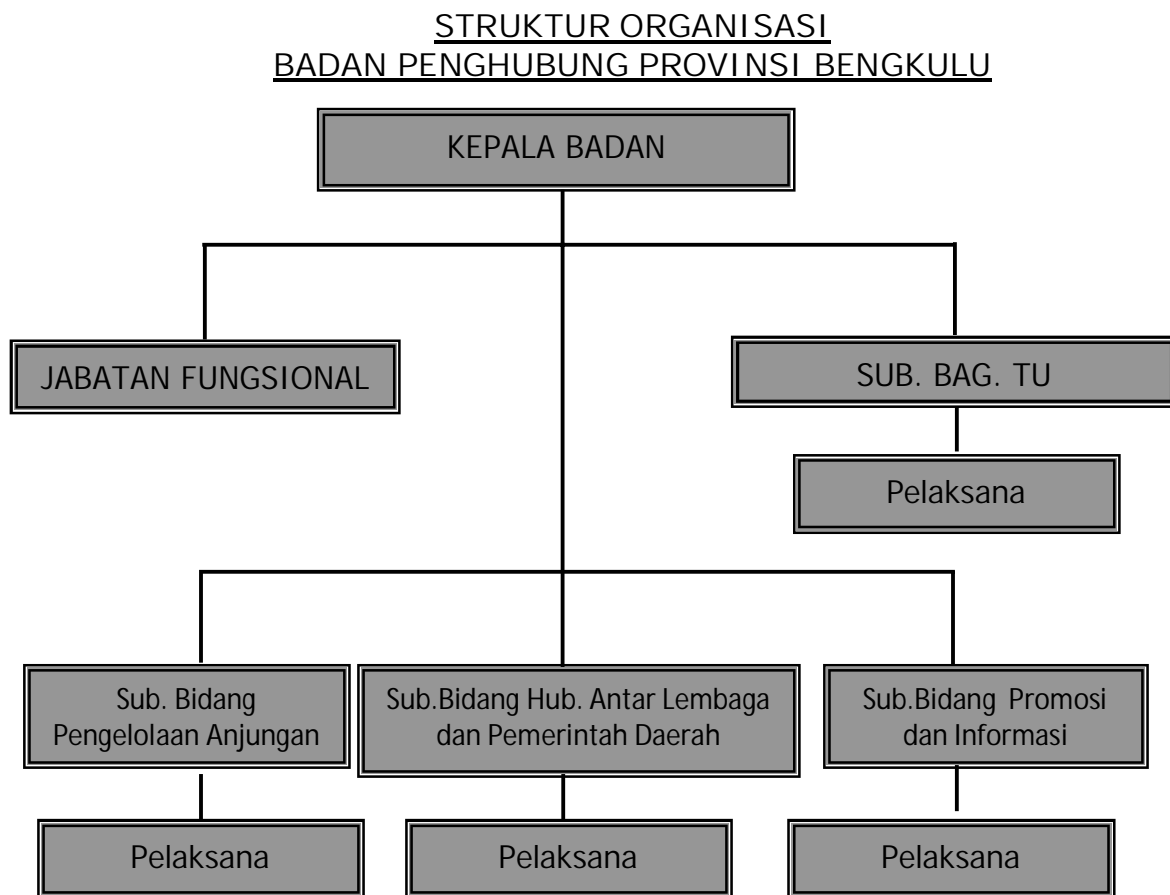
Dari rumusan tugas pokok, fungsi dan kewenangan organisasi seperti di atas, pada dasarnya Badan Penghubung Provinsi Bengkulu memiliki tiga sasaran pokok dalam pelayanannya. Pertama pelayanan yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penghubung Provinsi Bengkulu, kedua pelayanan yang ditujukan kepada aparatur dinas atau instansi yang menangani fungsi perencanaan pembangunan dan ketiga pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang disediakan dari APBD Tahun 2017 secara kuantitatif pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun secara kualitatif diakui masih terdapat kekurangan/kelemahan antara lain disebabkan:

1. Belum efektifnya pelaksana koordinasi, baik internal antara unit-unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bengkulu, maupun antara Badan Penghubung Provinsi Bengkulu dengan dinas/instansi di tingkat Propinsi Bengkulu, sehingga proses penyusunan program belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2. Masih lemahnya potensi PNS menyelesaikan masalah dan tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing seksi/sub-bagian

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya Badan Penghubung Provinsi Bengkulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor (Eselon III.a)
2. Kasub.Bag. Tata Usaha (Eselon IV.a)
3. Kasubbid Promosi dan Informasi (Eselon IV.a)
4. Kasubbid Hubungan Antar Lembaga (Eselon IV.a)
5. Kasubbid Hubungan Antar Pemerintah Daerah (Eselon IV.a)



Adapun tugas pokok dan fungsi bagian/seksi di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menunjang Koordinasi; pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan meyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta;
- Pelaksanaan koordinasi hubungan Antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Swasta serta Lembaga Internasional;
- Pelaksanaan Fasilitas pembinaan masyarakat Bengkulu se Jabodetabek;
- Pemberian Pelayanan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Bengkulu;
- Pelayanan akomodasi serta transportasi pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub-Bagian Tata Usaha

Tugas Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

“ Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundangan-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum dibidang penghubung, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran; dan mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan

anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Badan Penghubung.”

Fungsi Kepala Sub Bagian Umum :

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan pengarsipan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan , perawatan sarana dan prasarana badan;
- Pelaksanaan administrasi pencatatan asset dan barang milik Negara maupun daerah;
- Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Badan;
- Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Badan;
- Pengumpulan data dan informasi dari sub bidang di lingkungan Badan;
- Pemutakhiran informasi public berkenaan dengan urusan penghubung;
- Penghimpunan peraturan perundang-undangan dari sub bidang;
- Pengidentifikasian kebutuhan produk hokum daerah di bidang penghubung
- Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuha anggaran Badan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan;
- Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Badan;
- Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan pada Badan;
- Pengelolaan anggaran Badan;
- Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah;

- Perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Badan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Pengkoordinasian kegiatan perencanaan Badan;
- Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Badan dari bidang-bidang teknis;
- Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penghubung dari bidang-bidang teknis;
- Penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Badan Penghubung;
- Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan lima tahunan;
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan dan rapat teknis dibidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perintah atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah

Tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah:
" Kegiatan keprotokolan, akomodasi, transportasi, dan hubungan antar kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Pemerintah Departemen dan non Departemen, swasta dan internasional serta pembinaan masyarakat Bengkulu sejabodetabek berkaitan dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyiapan program kerja hubungan antar lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan, akomodasi, transportasi dan hubungan antar kelembagaan pemerintah daerah provinsi dan lembaga pemerintah departemen dan non departemen, swasta dan internasional;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat Bengkulu di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi;
- e. Pengurusan dan penyiapan perjalanan Pimpinan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja antar Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait penyediaan, penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- h. Pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi tentang masyarakat Bengkulu di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bidang Hubungan antar Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Sub Bidang Promosi dan Informasi

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai Tugas : melaksanakan kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Bengkulu meliputi bidang ekonomi dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kepala Sub Bidang Promosi dan Infomasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan promosi dan informasi serta Pembangunan Daerah Bengkulu yang meliputi bidang ekonomi dan pariwisata;
- b. Pengumpulan program kerja kegiatan promosi dan informasi untuk melakukan kegiatan promosi dan informasi Pembangunan Daerah Bengkulu;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bidang ekonomi dan pariwisata daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan promosi daerah Bengkulu;
- e. Pelaksanaan kegiatan informasi Daerah Bengkulu baik pengumpulan Data maupun penginformasian kepada masyarakat;
- f. Pelaksanaan fasilitasi media center;
- g. Pelaksanaan fasilitasi bisnis center;
- h. Pengevaluasian tugas sub Bidang Promosi dan Informasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.

e. Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah TMII

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah TMII mempunyai tugas *melaksanakan kegiatan pengelolaan Anjungan Provinsi Bengkulu di Taman Mini Indonesia Indah serta pergelaran seni Budaya Provinsi Bengkulu.*

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah TMII menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub Bidang Pengelolaan Anjungan;

- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum sub bidang Pengelolaan Anjungan;
- c. Pelaksanaan tata saji sub bidang Pengelolaan Anjungan;
- d. Pelaksanaan kegiatan seni budaya;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional Anjungan Provinsi Bengkulu di TMII;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Anjungan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub Bidang Pengelolaan Anjungan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bengkulu meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Mess Bengkulu merangkap sebagai Badan Penghubung Provinsi Bengkulu
2. Anjungan Bengkulu di TMII

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta antara lain : Roda empat 23 (dua puluh tiga) unit dengan rincian :

No	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	TAHUN
1	Sedan Volvo 960	1996
2	Toyota Corolla	1996
3	Sedan Timor S.5155	1998
4	Minibus Mitsubishi L.300	2003
5	Sedan Mitsubishi Lancer	2003
6	Minibus Toyota Avanza	2006
7	Sedan Hyundai	2006
8	Sedan Hyundai	2006
9	Sedan Hyundai	2006
10	Sedan Hyundai	2006
11	Sedan Toyota Camry	2006

12	Jeep Toyota Fortunner	2006
13	Jeep Toyota Fortunner	2007
14	Sedan Nissan Teana	2007
15	Minibus Toyota Kijang Innova	2007
16	Minibus Toyota Avanza	2008
17	Kia Pick Up	2010
18	Jeep Mitsubishi Pajero	2011
19	Minibus Toyota Kijang Innova	2011
20	Minibus Toyota Avanza	2011
21	Jeep Mitsubishi Pajero	2015
22	Minibus Toyota Hi Ace	2015
23	Minibus Toyota Hi Ace	2015
24	Honda Accord	2017
25	Toyota Alpaard	2017

Roda dua 7 (tujuh) unit dengan rincian :

No	KENDARAAN RODA 2 (DUA)	TAHUN
1	Sepeda Motor Honda Win	1988
2	Spd. Motor Turbo Strong X	2003
3	Spd. Motor Honda Karisma	2003
4	Spd. Motor Honda NF.125	2005
5	Spd. Motor Honda Gl.Pro III	2005
6	Spd. Motor Honda Gl.Pro III	2005
7	Spd. Motor Suzuki Thunder	2009
8	Honda Vario 125 cc	2017

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer, notebook, meja, kursi, lemari, mesin fax, mesin, telepon, dan alat pendukung dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

Jumlah Aparatur di Badan Penghubung Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2017 adalah 32 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 13 orang dan perempuan 19 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bengkulu terbagi menjadi

Tabel I.1
Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	5
2	Golongan II	7
3	Golongan III	18
4	Golongan IV	2
Jumlah		32

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan 2017

Tabel I.2
Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	4
2	SLTP	1
3	SLTA	7
4	D-3	2
5	S-1	15
6	S-2	3
Jumlah		31

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan 2017

Tabel I.3
Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No	Diklat	Jumlah
1	PIM TK. III	1
2	DIKLAT PIM TK. IV	2
Jumlah		3

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan 2017

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, dasar hukum, gambaran organisasi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KENERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2016.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV : PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bengkulu serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2. Perencanaan Strategis

2.1. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan pada kondisi makro, permasalahan dan isu-isu strategis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka visi Provinsi Bengkulu yang hendak dicapai tahun 2016-2021 adalah :

*“TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT,
DAN BERDAYA SAING TINGGI”*

Bengkulu yang Maju mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Provinsi Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan local. Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang terpenuhinya layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeselimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan.

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat provinsi Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang memiliki kompetensi, bertakwa serta memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa. Visi ini dapat

tercapai apabila masyarakat Prpvinsi Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani.

Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Provinsi Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan public, iklim usaha dan investasi, infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, komoditas unggulan, kemaritiman serta kepemudaan dan keolahragaan

2.2. Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu memiliki Visi dan Misi yang sejalan dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Bengkulu, Visi dan Misi RENSTRA Badan Penghubung sebagai berikut :

2.2.1. Visi dan Misi

Visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Bengkulu dibuat dengan mempertimbangkan visi dan misi Gubernur Bengkulu Periode 2016-2021 serta kondisi lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Penghubung Provinsi Bengkulu . Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Badan Penghubung dibawa dan berkarya agar dapat mewujudkan eksistensi, antisipatif, inovatif serta produktif. Misi merupakan gambaran tantangan keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Penghubung .

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan perumusan dan implementasi kebijakan oleh Badan Penghubung untuk mendukung Visi Badan Penghubung Provinsi Bengkulu 2016-2021 :

“Terwujudnya Badan Penghubung Sebagai Duta dan Fasilitator Pemerintah Provinsi Bengkulu yang Profesional”

Penjelasan Visi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung maka Visi Badan Penghubung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Badan Penghubung Sebagai Duta Provinsi Bengkulu : maksudnya adalah Badan Penghubung dapat menjadi show window Bengkulu yang akan mewakili Bengkulu dalam kegiatan-kegiatan diluar Provinsi Bengkulu

Fasilitator : Badan Penghubung akan menyediakan fasilitasi dan Pendampingan untuk mendukung Kegiatan Unsur Pimpinan Daerah baik, DPRD dan OPD lainnya diluar Provinsi Bengkulu serta Fasilitasi bagi Kementerian / Lembaga dan Provinsi lain serta swasta dalam upaya Peningkatan Daya Saing dan Investasi Daerah.

Profesional : Badan Penghubung akan melaksanakan tugasnya sebagai Duta dan Fasilitator sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksana) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang berlaku

Misi Badan Penghubung

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu, adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu diluar Daerah Bengkulu
- Meningkatkan pelayanan public yang Efektif dan Efisien
- Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Misi I: Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu di Luar Daerah Bengkulu

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Tujuan

Mendukung Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah

b. Sasaran

Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pemerintahan Daerah

Misi II: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

a. Tujuan

Mewujudkan *clean* dan *good governance*

b. Sasaran

- Tercapainya pelayanan prima di segala bidang/sector
- Terus meningkatnya nilai LAKIP OPD dari tahun ke tahun

Misi III: Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah.

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi terhadap lembaga pemerintahan dan swasta

b. Sasaran

Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan keberhasilan Pembangunan Daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Misi I: Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu di Luar Bengkulu.

Strategi:

Peningkatan Informasi dan Promosi Daerah

Arah Kebijakan

- Meningkatkan Kuantitas Promosi Potensi Daerah keluar Bengkulu
- Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang Potensi Daerah

Misi II: Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Strategi:

- Mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- Menciptakan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional;

Arah Kebijakan:

- Membangun kinerja aparatur yang akuntabel;
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar penunjang untuk mendukung kinerja aparatur yang profesional.

Misi III: Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi SDM

Strategi:

- Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan, Aset dan Belanja Daerah.

Arah Kebijakan

- Mengoptimalkan dan Memperluas Sumber dan Jenis Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan pelayanan Informasi bagi Masyarakat Bengkulu di Perantauan
- Meningkatkan Pelayanan Kedinasan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, DPRD dan SKPD
- Meningkatkan Pelayanan Kedinasan untuk mendukung Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Perencanaan dan perjanjian kinerja dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen penetapan kinerja yang disusun memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Badan Penghubung, beserta target kinerja dan anggaran.

Adapun kinerja yang direncanakan dan dijanjikan oleh Badan Penghubung adalah sebagai berikut

Tabel III.1
Indikator Kinerja Sasaran I.
Meningkatkan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta
baik di Tingkat Pusat Maupun Daerah

Uraian	Satuan	Target 2017	REALISASI		% Capaian 2017
			Tahun 2016	Tahun 2017	
Jumlah Fasilitasi Pemprov dengan Pemerintah Pusat dan Swasta yang dilayani	Pendampingan	60	108	60	100
Jumlah Fasilitasi Pemprov dengan Pemerintah Pusat dan swasta yang dilayani	Pendampingan	60	70	60	100
Jumlah Masyarakat Bengkulu di Jakarta yang hadir di kegiatan halal bihalal	Orang yang hadir	0	1000	0	0

Sasaran Strategis I Meningkatkan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta baik di Tingkat Pusat Maupun Daerah dapat tercapai dikarenakan Kantor Perwakilan yang sekarang berganti nama menjadi Badan Penghubung telah menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Swasta yang dituju oleh Pihak yang membutuhkan pelayanan Kantor Perwakilan. Adapun Kendala yang dihadapi adalah karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas dari Personil Protokoler sehingga sedikit mengurangi kualitas pelayanan. Kedepannya Kantor Perwakilan / Badan Penghubung telah menghubungi Dinas terkait untuk meminta bantuan tambahan untuk protokoler dan menganggarkan untuk peningkatan SDM.

Tabel III.2
Indikator Kinerja Sasaran II.
Meningkatkan Pelayanan Prima disegala Bidang / sektor

Uraian	Satuan	Target 2017	REALISASI		% Capaian 2017
			Tahun 2016	Tahun 2017	
Jumlah surat / dokumen yang terkirim	paket	100	0	0	100
Jangka waktu pembiayaan tagihan telp, air dan listrik	bulan	12	12	12	100
Jumlah gedung yang menjadi jaminan milik daerah	gedung	2	1	2	100
Jangka waktu pelaksanaan admin keuangan	bulan	12	12	12	100
Jangka Waktu tenaga kebersihan kantor yang dibiayai	orang	12	10	12	100
Jangka Waktu Pemakaian ATK Kantor	bulan	12	12	12	100
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	item	7	10	7	100
Jumlah komponen listrik gedung kantor	item	14	30	14	100
Jumlah peralatan rumah tangga	media nasional	5	2	5	100
Jangka Waktu Pembiayaan bahan bacaan dan peraturan perundangan media local dan nasional	bulan	12	12	12	100
Jumlah penyediaan makanan dan minuman	kali	96	12	96	100
Jangka waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	100

Jumlah jasa adm dan teknis perkantoran	OB	240	12	240	240
Jangka waktu pelaksanaan penatausahaan kearsipan	OB	24	12	24	100
Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Unit kendaraan	4	0	3	100
Jml Peralatan Kantor yang diadakan	Item	8	12	8	100
Jumlah Alat dan Benda Seni Budaya	Jenis	2	2	2	100
Jenis Pemeliharaan Gedung kantor dan anjungan Bengkulu TMII	Jenis	5	1	5	100
Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Unit kendaraan	23	12	23	100
Jangka Waktu Terpeliharanya halaman / taman rumah adat Bengkulu TMII	Bulan	12	10	12	100
Jml Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	kegiatan	3	12	3	100

Indikator Kinerja Sasaran II. Meningkatkan Pelayanan Prima disegala Bidang / sector merupakan Program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Badan Penghubung untuk dapat menjalankan Tugas dan Fungsinya, semua dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan, hampir tidak ada kendala yang dihadapi untuk mencapai Sasaran kedua ini, hanya terdapat penundaan pembelian 1 (satu) kendaraan dinas dikarenakan untuk pengefisienan, sehingga pembelian kendaraan dinas tersebut akan di anggarkan di kemudian hari.

Tabel III.3
Indikator Kinerja Sasaran III.
Meningkatnya Nilai LAKIP APBD dari Tahun ke Tahun

Uraian	Satuan	Target 2017	REALISASI		% Capaian 2017
			Tahun 2016	Tahun 2017	
Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	3	5	3	100
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	0	2	0	100
Jml Pelaporan Prognosis, realisasi Anggaran	Laporan	0	2	0	100

Indikator Kinerja Sasaran III. Meningkatnya Nilai LAKIP APBD dari Tahun ke Tahun

Sasaran ini dapat dicapai dengan tersedianya Dokumen – dokumen capaian kinerja yang berupa RKA, DPA, LK dan KAK, Renja, TEPR, LAKIP, Laporan Keuangan Semester I dan II serta Pelaporan Prognosis, realiasi Anggaran serta Neraca TA 2017. Diharapkan dengan adanya dokumen dokumen yang tersebut diatas dapat meningkatkan akuntabilitas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

Tabel III.4

Indikator Kinerja Sasaran IV.

Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan Daerah

Uraian	Satuan	Target 2017	REALISASI		% Capaian 2017
			Tahun 2016	Tahun 2017	
Jml Promosi Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta	Pagelaran/ Pameran	15	104	15	99.9

Indikator Kinerja Sasaran IV. Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan Daerah mengalami penurunan dari Tahun 2017 dikarenakan adanya efisiensi dan penyusutan Anggaran Badan Penghubung sehingga tidak dapat mengikuti Pekan Raya Jakarta, akan tetapi dialihkan pada Kegiatan Car Free Day bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, pada kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran tujuan Visi dan Misi sebagaimana diterapkan dalam perencanaan strategis Badan Penghubung Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 orang eselon III, 3 orang Eselon IV, 1 orang Pelaksana Tugas, 27 orang staf, prasarana dan serta anggaran. Adapun realisasi anggaran yang dikelola pada tahun 2017 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung Rp. 6.766.263.735,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta

Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima rupiah), dan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.480.400.306,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah).

Berdasarkan kegiatan, program dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan satu kesatuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penghubung Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dengan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016.

Tabel II.5 menggambarkan realisasi anggaran 2017, dikarenakan ada pengefisienan anggaran pada APBD Perubahan TA.2017 sehingga Capaian dan Masukan tercapai sesuai target dengan Anggaran yang dikeluarkan lebih rendah

TABEL II.5
REALISASI ANGGARAN 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN	600.000.000	611.625.000	11.625.000
Pendapatan Asli Daerah	600.000.000	611.625.000	11.625.000
Hasil Retribusi Daerah	600.000.000	611.625.000	11.625.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	7.200.000	7.200.000
Retribusi Tempat Penginapan	600.000.000	604.425.000	4.425.000
BELANJA	11.110.532.805	9.480.400.306	(1.630.132.499)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.446.120.805	2.714.136.571	(731.984.234)
BELANJA LANGSUNG	7.664.412.000	6.766.263.735	(898.148.265)

Sumber : Simda 2017 "Laporan Realisasi APBD"

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditunjukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap semua program pada Badan Penghubung Provinsi Bengkulu menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih ada, namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

A. Saran

Untuk menjamin keberhasilan implementasi indikator kinerja di Badan Penghubung Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen yang terkait, dilaksanakan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang meliputi Kegiatan Keuangan dari bulan Januari s/d bulan Desember 2017, kiranya dapat menjadi bahan pengkajian dan evaluasi pada tahun yang akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2018

Ketua Badan Penghubung
Provinsi Bengkulu,



Drs. KHARIL ANWAR., M.Si
Pembina Tk.1/NIP. 19711031 199101 1 001